

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DAN KINERJA ANGGARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO TIMUR

Keli Malasari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia

e-mail : malasarikeli@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas terhadap Kinerja Manajerial dan Kinerja Anggaran sebagai variabel intervening pada pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur. Populasi dalam penelitian ini ialah 53 pegawai Negeri Sipil, data diambil dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data dianalisis dengan menggunakan SmartPLS Versi 3. Hasil penelitian ini ialah Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja Manajerial, Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial, Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial, Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja Anggaran, Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja Anggaran, Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Anggaran, Kinerja Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran, Kinerja Manajerial memediasi pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Anggaran, Kinerja Manajerial memediasi pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Anggaran, Kinerja Manajerial memediasi pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur.

Kata kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas, Kinerja Manajerial, Kinerja Anggaran

Latar Belakang

Pada dewasa ini di Sektor Publik khususnya mengalami perkembangan Pemerintahan yang cukup pesat dimana telah adanya Desentralisasi yang menuntut setiap Daerah mampu mengelola Daerahnya sendiri begitu pula dalam Penyusunan Anggaran. Terdapat perbedaan Anggaran dengan sektor swasta yakni Anggaran pada Sektor Publik terkait dengan proses penentuan jumlah Alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Dana organisasi yang diperoleh oleh Sektor Publik berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik Daerah atau Negara, pinjaman Pemerintah

berupa utang Luar Negeri dan obligasi Pemerintah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Adanya kewajiban Pemerintah, baik di Pusat dan Daerah, untuk menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance Government*) menyebabkan Pemerintah berupaya untuk selalu menyajikan kinerja anggaran yang baik dan mampu dipertanggungjawabkan pada setiap kegiatan yang dilakukan. Keuangan sebagai salah satu hal yang dituntut untuk transparan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memiliki nilai tertentu dalam laporan sebagai ukuran dan informasi sejauh mana kinerja

keuangan pemerintahan berjalan layak dan semestinya. Nilai informasi laporan keuangan dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2018).

Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah merupakan isu yang saat ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat dan mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan Instansi Pemerintah. Tuntutan Akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun Daerah menyebabkan seluruh Instansi Pemerintah menyusun perencanaan strategik, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya. Kinerja Manajerial adalah kemampuan atau prestasi kerja yang telah dicapai oleh para personel atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawab mereka dalam menjalankan operasional perusahaan.

Seseorang yang memegang posisi Manajerial diharapkan mampu menghasilkan Kinerja Manajerial yang berbeda dengan Kinerja karyawan. Pada umumnya Kinerja karyawan bersifat konkret, sedangkan Kinerja Manajerial bersifat abstrak dan kompleks. Manajer menghasilkan Kinerja dengan mengarahkan bakat dan kemampuan, serta usaha beberapa orang lain yang berada dalam daerah wewenangnya.

Ada beberapa faktor yang diduga penyebab Kinerja Pemerintah Daerah rendah diantaranya karena sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dalam proses Perencanaan dan Penganggaran APBD, pelaksanaan/penatausahaan APBD, pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD dan pengawasan. Dalam proses Penganggaran, pemerintah daerah selalu mengalami keterlambatan di dalam pengesahan perda APBD. Keterlambatan ini menyebabkan

banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun Anggaran berjalan sehingga terjadi keterlambatan pembangunan daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang harus disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyusunan APBD itu sendiri merupakan suatu proses yang panjang melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan penjarangan aspirasi masyarakat yang kemudian dibahas melalui Rapat koordinasi Pembangunan (Rakorbang) pada tiap tingkatan.

Sebagai organisasi Sektor Publik, Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki Kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, disamping itu pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan pembagian tugas yang baik pada pemerintahan yang ada dilingkungan daerah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi tersebut diajukan kepada pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara Negara yang diamanatkan kepada mereka (Afrina, 2015). Faktor yang dapat mempengaruhi Kinerja Manajerial yaitu salah satunya adalah Kejelasan dalam menentukan Sasaran suatu Anggaran. Kejelasan Sasaran Anggaran menggambarkan luasnya tujuan Anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik serta dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya. Kejelasan tujuan Anggaran merupakan hal yang paling penting dalam pencapaian suatu tujuan organisasi karena akan menentukan arah tujuan suatu organisasi.

Tujuan Anggaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, tekanan dan ketidakpuasan dari karyawan yang akan berdampak buruk terhadap Kinerja Manajerial (Suyanto, 2011). Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan sejauh mana tujuan Anggaran ditetapkan secara jelas dan

spesifik dengan tujuan agar Anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian Anggaran tersebut. Kejelasan Sasaran Anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun Anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai Instansi Pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi (Amril, 2014).

Disamping kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran juga dapat meningkatkan Kinerja Manajerial SKPD. Partisipasi Penyusunan Anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh seseorang dalam proses Penyusunan Anggaran. Partisipasi Penyusunan Anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan prestasi (Kinerja) yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Adanya partisipasi mendorong setiap Manajer untuk meningkatkan prestasinya dan menganggap bahwa target organisasi adalah merupakan target pribadinya juga. Sebagai organisasi Sektor Publik, Pemerintah Daerah dituntut agar memiliki Kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong Pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada Pemerintah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka.

Selain Kejelasan dalam menentukan Sasaran Anggaran dan Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, untuk meningkatkan Kinerja Manajerial juga diperlukan Akuntabilitas yang baik untuk meningkatkan Kinerja Manajerial dalam suatu organisasi. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya (Lukito, 2014).

Objek penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Adapun fenomena yang terjadi saat ini, adalah dimana kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran dan juga akuntabilitas pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur terdapat beberapa permasalahan, masalah pertama pada kejelasan sasaran anggaran, diketahui bahwa sebelum melakukan perencanaan anggaran maka Staf bendahara di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur harus melakukan rincian anggaran dan rencana apa yang akan dilakukan untuk anggaran tersebut, namun diketahui bahwa bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur belum melaksanakan perencanaan anggaran dengan baik, dikarenakan masih ada ketidakjelasan sasaran anggaran yang akan dilakukan, misalnya saja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur hendak melaksanakan pembangunan pada suatu daerah namun ternyata anggaran yang diberikan tidak sesuai, karena pada awal perencanaan staf bendahara tidak menjabarkan keperluan yang harus dipenuhi.

Permasalahan selanjutnya ialah partisipasi penyusunan anggaran, dimana staf bendahara hanya melakukan penyusunan anggaran sendiri, sehingga laporan anggaran tidak dapat diserahkan kepada Kepala Dinas tepat waktu, hal tersebut dikarenakan Kasubbag keuangan jarang membantu staf bendahara dalam penyusunan anggaran, hendaknya

Kasubbag keuangan dapat berpartisipasi atas penyusunan anggaran tersebut agar dapat diserahkan atau diberikan tepat waktu.

Sedangkan permasalahan pada akuntabilitas adalah dimana beberapa anggaran yang telah dianggarkan untuk pembangunan lain, harus digunakan untuk pembangunan rumah isolasi untuk penyintas covid 19, sedangkan anggaran tersebut telah diprioritaskan untuk pembangunan beberapa daerah, namun harus dialihfungsikan sebagai dana anggaran covid 19, tidak hanya hal tersebut, permasalahan pada akuntabilitas ialah dimana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur mengajukan penambahan ABT, ABT yang dimaksud ialah anggaran tambahan yang diajukan akibat adanya kebutuhan dana tambahan disebabkan beban biaya yang melebihi anggaran ataupun tambahan kegiatan yang belum terealisasi, hal ini menandakan bahwa perencanaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur belum matang.

Penelitian sebelumnya oleh Sari, Taufik, dan Hasan (2014) menunjukan bahwa (1) Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (2) Akuntabilitas Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), (3) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), (4) Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Publik, Desentralisasi, dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pada penelitian Afrina (2015) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern Dan Sistem Pelaporan

Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Persepsi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian intern dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja lembaga publik. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya peneliti pun terPartisipasi Penyusunan Anggaran untuk meneliti kembali penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian yang diambil oleh peneliti yang dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung dan sedangkan peneliti sendiri objek penelitian yang digunakan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur. Perbedaan lainnya terletak pada variabel dependen yang peneliti gunakan. Maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi 9 Penyusunan Anggaran, dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Studi Literatur Kinerja Anggaran

Kemenkeu (2018) menjelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam sistem perencanaan penganggaran belanja Negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Mahmudi (2018) menjelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian

keluaran dan hasil tersebut. Menurut Halim dan Kusufi (2018), anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional dan anggaran kinerja menekankan pada konsep value for money.

Menurut Mardiasmo (2018) dalam indikator Value for Money terdapat konsep yang dikenal dengan 3E yaitu sebagai berikut ini. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan *masukan (cash of input)*. Dalam pengertian ekonomi (hemat atau tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Efisiensi, sangat berhubungan erat dengan produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Menurut Nordiawan (2018) terdapat beberapa karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja yaitu sebagai berikut: (1) mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas serta unit organisasi dan rincian belanja; (2) menyelidiki dan mengukur aktivitas guna mendapatkan efisiensi maksimum dan standar biaya; dan (3) mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya per unit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan harus dilakukan pada periode tersebut.

Bastian (2017) menjelaskan bahwa setelah diterapkannya anggaran berbasis kinerja ternyata memiliki keunggulan, yaitu meliputi: (1) memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan; (2) merangsang partisipasi dan Partisipasi Penyusunan Anggaran unit kerja melalui proses pengusulan dan penilaian anggaran yang bersifat faktual; (3) membantu fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan keputusan; (4) memungkinkan alokasi dana secara optimal dengan didasarkan pada

efisiensi unit kerja; dan (5) menghindarkan pemborosan.

Menurut Kemenkeu (2015) indikator kinerja meliputi: (1) Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif; (2) Revisi Halaman III DIPA, dapat dilakukan penghitungan rencana penarikan dana seakurat mungkin, karena rencana penarikan dana pada halaman III DIPA akan menjadi dasar pembuatan perkiraan pencairan dana harian; (3) Pagu Minus, dapat mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus secepat mungkin; (4) Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu (Maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani); (5) Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal di revolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/disetor; (6) Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), rekon disampaikan ke KPPN secara tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya); (7) Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM; (8) Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai target penyerapan anggaran; (9) Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan); (10) Konfirmasi Capaian *Output*, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya. bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran; (11) Retur SP2D yang diakibatkan kesalahan penulisan rekening/ rekening tidak aktif. Halaman III DIPA untuk meningkatkan akurasi pelaksanaan sesuai dengan perencanaan; (12) Renkas, akurasi perencanaan kas agar menjadi perhatian dan disampaikan ke KPPN sebelum jatuh tempo perencanaan kas tersebut yaitu sehari sebelumnya jatuh tempo RPD harian pada

pukul 12.00; (13) Kesalahan SPM yang diakibatkan kekurangtelitian, sehingga tidak dapat di proses oleh sistem KPPN.

Menurut Yuwono, Indrajaya, dan Hariyandi (2018) terdapat persyaratan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja dengan baik di lembaga pemerintah daerah. Pertama, keterlibatan DPRD dalam perencanaan anggaran karena DPRD merupakan wakil dari masyarakat sehingga dalam proses perencanaan anggaran harus dilibatkan agar menimbulkan konsekuensi DPRD yang harus proaktif dan dapat menetapkan dua pokok hal yaitu arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD. Kedua, adanya desentralisasi wewenang hingga ke level unit kerja sebagai pusat pertanggungjawaban. Dalam hal ini anggaran digunakan untuk alokasi sejumlah dana kepada unit kerja untuk mengelola sumber dana yang ada.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 39 Ayat 2 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Selanjutnya, dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dijelaskan bahwa untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan sebagai berikut: (1) Penerapan serta jelas tujuan dan sasaran, hasil, dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai; dan (2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Metode Penelitian

Penelitian kuantitatif biasanya menggunakan desain eksplanasi, di mana objek telaahan penelitian eksplanasi (*explanatory research*) adalah untuk menguji hubungan antar-variabel yang dihipotesiskan.

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. Kinerja Anggaran (Y) merupakan metode

penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Indikatornya adalah Y.1 Revisi DIPA, Y.2 Revisi Halaman III DIPA, Y.3 Pagu Minus, Y.4 Menyampaikan data kontrak, secara tepat wakt, Y.5 Pengelolaan Uang, Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), Y.6 Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Y.7 Dispensasi SPM, Y.8 Penyerapan Anggaran, Y.9 Penyelesaian tagihan, Y.10 Konfirmasi Capaian Output, Y.11 Retur SP2D, Y.12 Renkas, dan Y.13 Kesalahan SPM.

Kinerja Manajerial (Z) adalah tingkat pencapaian hasil dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi tersebut, atau dapat pula disimpulkan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu tingkatan sejauh mana proses kegiatan organisasi itu memberikan hasil atau mencapai tujuan. (Nengsy, 2017). Indikatornya adalah Z.1 Perencanaan, Z.2 Investigasi, Z.3 Koordinasi, Z.4 Evaluasi, Z.5 Pengawasan, Z.6 Pemilihan Staff, Z.7 Negosiasi, dan Z.8 Perwakilan.

Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) adalah kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan meyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini meyebabkan pelaksana anggaran tidak Skala Likert. Indikatornya X1.1 Tujuan, X1.2 Kinerja, X1.3 Standar, X1.4 Jangka waktu, X1.5 Sasaran prioritas, X1.6 Tingkat kesulitan, X1.7 Koordinasi Partisipasi Penyusunan Anggaran untuk mencapai kinerja yang diharapkan. (Nengsy, 2017).

Partisipasi Penyusunan Anggaran (X2) adalah suatu tingkat atau derajat dimana para individu terlibat dalam proses penyusunan anggaran yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap para individu tersebut (Nengsy, 2017). Indikatornya adalah X2.1 Keterlibatan proses; X2.2 Rasa puas; X2.3 Kepentingan

berpendapat, dan X2.4 Kesiediaan berpendapat.

Akuntabilitas (X3) adalah akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Indikatornya adalah X3.1 Tanggung Jawab, X3.2 Jujur, X3.3 Kejelasan Target, X3.4 Netral, X3.5 Mendahulukan kepentingan umum, X3.6 Adil dan merata, X3.7 Transparan, X3.8 Konsisten dan dapat diandalkan dan X3.9 partisipatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja Manajerial pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur, dari hasil analisis maka hipotesis terbukti, hal tersebut dilihat dari nilai P Value yang kurang dari 0,05 yaitu 0,012 dan memiliki original sampel yang positif yaitu 0.112

Sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu pegawai memahami persis apa yang harus Pegawai lakukan dalam pekerjaan Pegawai, Pegawai memahami bagaimana kinerja Pegawai diukur, Pegawai memiliki sasaran yang jelas yang membantu

Pegawai dalam melakukan pekerjaan, Pegawai mempunyai batas waktu untuk mencapai sasaran pekerjaan. Jika Pegawai mempunyai lebih dari satu sasaran untuk dicapai, Pegawai mengetahui mana yang paling penting dan yang kurang penting, Sasaran dalam pekerjaan Pegawai cukup menantang, tetapi layak (tidak terlalu mudah maupun sulit), Dalam instansi ini, tim bekerja sama untuk mencapai sasaran

Menurut Yulianto (2019:209) “Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut”.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Intan Lesmana (2019), yang

menyatakan bahwa kejelasan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur, dari hasil analisis maka hipotesis terbukti, hal tersebut dilihat dari nilai P Value yang kurang dari 0,05 yaitu 0,000 dan memiliki original sampel yang positif yaitu 0.572

Maka sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu Pegawai ikut dan terlibat dalam penyusunan semua anggaran, Menurut Pegawai dilakukannya revisi anggaran adalah masuk akal, Usulan anggaran dari Pegawai berpengaruh dalam anggaran akhir, Atasan Pegawai sering meminta pendapat bawahan dalam proses penyusunan anggaran

Menurut M. Nafarin (2012:11), definisi partisipasi penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: “Partisipasi penyusunan anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu di dalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada di dalam divisi atau bagiannya, baik secara periodik maupun tahunan.”

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Syafitra H. 2018, yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur, dari hasil analisis maka hipotesis terbukti, hal tersebut dilihat dari nilai P Value yang kurang dari 0,05 yaitu 0,027 dan memiliki original sampel yang positif yaitu 0.275. Maka sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa dana masyarakat menghasilkan output maksimal, Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik, Pelaksanaan program-program APBD

benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Anggaran yang diusulkan mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang ditetapkan Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku Audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah yaitu masyarakat.

Maka penelitian ini sejalan dengan penelitian Silvia Andarina, 2018, yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial

Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur

Dari hasil analisis maka hipotesis terbukti, hal tersebut dilihat dari nilai P Value yang kurang dari 0,05 yaitu 0,043 dan memiliki original sampel yang positif yaitu 0.069

Maka sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu pegawai memahami persis apa yang harus Pegawai lakukan dalam pekerjaan Pegawai, Pegawai memahami bagaimana kinerja Pegawai diukur, Pegawai memiliki sasaran yang jelas yang membantu Pegawai dalam melakukan pekerjaan, Pegawai mempunyai batas waktu untuk mencapai sasaran pekerjaan, Jika Pegawai mempunyai lebih dari satu sasaran untuk dicapai, Pegawai mengetahui mana yang paling penting dan yang kurang penting, Sasaran dalam pekerjaan Pegawai cukup menantang, tetapi layak (tidak terlalu mudah maupun sulit), Dalam instansi ini, tim bekerja sama untuk mencapai sasaran

Menurut Yulianto (2019:209) kejelasan Anggaran adalah sebagai berikut:

“Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut”.

Penelitian ini sejalan dengan Intan lesmana, 2019, yang menyatakan bahwa kejelasan anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

Partisipasi Penyusunan Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur

Dari hasil analisis maka hipotesis terbukti, hal tersebut dilihat dari nilai P Value yang kurang dari 0,05 yaitu 0,001 dan memiliki original sampel yang positif yaitu 0.110. Maka sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu Pegawai ikut dan terlibat dalam penyusunan semua anggaran, Menurut Pegawai dilakukannya revisi anggaran adalah masuk akal, Usulan anggaran dari Pegawai berpengaruh dalam anggaran akhir, Atasan Pegawai sering meminta pendapat bawahan dalam proses penyusunan anggaran

Menurut M. Nafarin (2012:11) “Partisipasi penyusunan anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu di dalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada di dalam divisi atau bagiannya, baik secara periodik maupun tahunan.”

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tessa, 2013, yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur

Dari hasil analisis maka hipotesis terbukti, hal tersebut dilihat dari nilai P Value yang kurang dari 0,05 yaitu 0,000 dan memiliki original sampel yang positif yaitu 0.756

Maka sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa dana masyarakat menghasilkan output maksimal, Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik, Pelaksanaan program-program APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Anggaran yang diusulkan mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang ditetapkan Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku Audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah yaitu masyarakat.

Maka penelitian ini sejalan dengan penelitian Silvia Andarina, 2018, yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial

Kinerja manajerial berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur

Dari hasil analisis maka hipotesis terbukti, hal tersebut dilihat dari nilai P Value yang kurang dari 0,05 yaitu 0,013 dan memiliki original sampel yang positif yaitu 0.106. Maka sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu Perencanaan Pegawai berperan dalam penentuan tujuan, kebijakan rencana kegiatan seperti penjadwalan kerja, penyusunan anggaran dan penyusunan program Investigasi Pegawai, berperan dalam pengumpulan dan penyiapan informasi yang biasanya berbentuk catatan dan laporan, Pengkoordinasian Pegawai ikut berperan dalam tukar menukar

informasi dalam organisasi untuk mengkoordinasikan dan menyesuaikan laporan, Evaluasi Pegawai berperan dalam mengevaluasi dan menilai rencana kerja, laporan kinerja maupun kerja yang diamati pada unit/sub unit Pegawai, Pengawasan Pegawai berperan dalam mengarahkan, memimpin dan mengembangkan para bawahan yang ada pada unit/ sub unit Pegawai, Negosiasi Pegawai berperan dalam melakukan kontrak untuk barang / jasa yang dibutuhkan pada unit / sub unit Pegawai dengan pihak luar, Perwakilan Pegawai berperan dalam mewakili organisasi Pegawai untuk berhubungan dengan pihak lain diluar organisasi, Kinerja secara menyeluruh Pegawai mengevaluasi kinerja, dan sasaran kinerja secara menyeluruh

Kinerja manajerial menurut Mahoney dalam Desi Yulianti (2014:12) diartikan sebagai: Kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf (staffing), negosiasi dan representasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Andhika Prawira, 2019, yang menyatakan bahwa kinerja manajerial mempengaruhi kinerja anggaran.

Kinerja Manajerial memediasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur

Dari hasil analisis maka hipotesis terbukti, hal tersebut dilihat dari nilai P Value yang kurang dari 0,05 yaitu 0,000 dan memiliki original sampel yang positif yaitu 0.529, dan diketahui bahwa pengaruh tidak langsung memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung dilihat dari t statistic yaitu $5.408 > 2.018$

Maka sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu pegawai memahami persis apa yang harus Pegawai lakukan dalam pekerjaan Pegawai, Pegawai memahami bagaimana kinerja Pegawai diukur, Pegawai memiliki sasaran yang jelas yang membantu Pegawai dalam melakukan

pekerjaan, Pegawai mempunyai batas waktu untuk mencapai sasaran pekerjaan, Jika Pegawai mempunyai lebih dari satu sasaran untuk dicapai, Pegawai mengetahui mana yang paling penting dan yang kurang penting, Sasaran dalam pekerjaan Pegawai cukup menantang, tetapi layak (tidak terlalu mudah maupun sulit), Dalam instansi ini, tim bekerja sama untuk mencapai sasaran.

Menurut Yulianto (2019:209) kejelasan Anggaran adalah sebagai berikut: "Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut".

Kinerja Manajerial memediasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur

Hal tersebut dilihat dari nilai P Value yang kurang dari 0,05 yaitu 0,020 dan memiliki original sampel yang positif yaitu 0.072, dan diketahui bahwa pengaruh tidak langsung memiliki pengaruh lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung dilihat dari t statistic yaitu $3.391 > 2.335$.

Maka sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu Pegawai ikut dan terlibat dalam penyusunan semua anggaran, Menurut Pegawai dilakukannya revisi anggaran adalah masuk akal, Usulan anggaran dari Pegawai berpengaruh dalam anggaran akhir, Atasan Pegawai sering meminta pendapat bawahan dalam proses penyusunan anggaran.

Menurut M. Nafarin (2012:11), definisi partisipasi penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: "Partisipasi penyusunan anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu di dalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada di dalam divisi atau bagiannya, baik secara periodik maupun tahunan."

Kinerja Manajerial memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur

Hal tersebut dilihat dari nilai P Value yang kurang dari 0,05 yaitu 0,013 dan memiliki original sampel yang positif yaitu 0.107, dan diketahui bahwa pengaruh tidak langsung memiliki pengaruh lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung dilihat dari t statistik yaitu $2.499 < 23.065$

Maka sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa dana masyarakat menghasilkan output maksimal, Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik, Pelaksanaan program-program APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Anggaran yang diusulkan mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang ditetapkan Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku Audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja Manajerial; (2) Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial; (3) Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial; (4) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja Anggaran; (5) Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja Anggaran; (6) Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja

Anggaran; (7) Kinerja manajerial berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada; (8) Kinerja Manajerial memediasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja anggaran; (9) Kinerja Manajerial memediasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja anggaran; dan (10) Kinerja Manajerial memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan untuk hasil penelitian dan pembahasan, sebagai berikut ini. Sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur pegawai memahami persis apa yang harus Pegawai lakukan dalam pekerjaan Pegawai, Pegawai memahami bagaimana kinerja Pegawai diukur.

Pegawai memiliki sasaran yang jelas yang membantu Pegawai dalam melakukan pekerjaan, Pegawai mempunyai batas waktu untuk mencapai sasaran pekerjaan, Jika Pegawai mempunyai lebih dari satu sasaran untuk dicapai, Pegawai mengetahui mana yang paling penting dan yang kurang penting, Sasaran dalam pekerjaan Pegawai cukup menantang, tetapi layak (tidak terlalu mudah maupun sulit), Dalam instansi ini, tim bekerja sama untuk mencapai sasaran.

Sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Pegawai ikut dan terlibat dalam penyusunan semua anggaran, Menurut Pegawai dilakukannya revisi anggaran adalah masuk akal, Usulan anggaran dari Pegawai berpengaruh dalam anggaran akhir, Atasan Pegawai sering meminta pendapat bawahan dalam proses penyusunan anggaran.

Sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip

efisiensi bahwa dana masyarakat menghasilkan output maksimal.

Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik, Pelaksanaan program-program APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Anggaran yang diusulkan mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang ditetapkan Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku

Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku Audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku.

Sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Perencanaan Pegawai berperan dalam penentuan tujuan, kebijakan rencana kegiatan seperti penjadwalan kerja, penyusunan anggaran dan penyusunan program Investigasi Pegawai, berperan dalam pengumpulan dan penyiapan informasi yang biasanya berbentuk catatan dan laporan.

Pengkoordinasian Pegawai ikut berperan dalam tukar menukar informasi dalam organisasi untuk mengkoordinasikan dan menyesuaikan laporan, Evaluasi Pegawai berperan dalam mengevaluasi dan menilai rencana kerja, laporan kinerja maupun kerja yang diamati pada unit/sub unit Pegawai.

Pengawasan Pegawai berperan dalam mengarahkan, memimpin dan mengembangkan para bawahan yang ada pada unit/subunit Pegawai, Negosiasi Pegawai berperan dalam melakukan kontrak untuk barang/jasa yang dibutuhkan pada unit/sub unit Pegawai dengan pihak luar.

Perwakilan Pegawai berperan dalam mewakili organisasi Pegawai untuk berhubungan dengan pihak lain diluar organisasi, Kinerja secara menyeluruh Pegawai mengevaluasi kinerja, dan sasaran kinerja secara menyeluruh

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, Dina. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Studi Persepsian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *Falkutas Ekonomi*, Universitas Riau. JOM FEKON Vol. 2.
- Agus Harjito dan Martono. 2011. *Manajemen Keuangan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Ekonisia. Yogyakarta.
- Amril, Vonny nofisa. 2014. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Skpd (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung). Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2018. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2018. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor : PER-1/AG/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran.
- Lukito, Penny Kusumastuti. 2014, *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi ke Depan*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Mahmudi. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. UII Press. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nengsy, Herda. 2107. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Manajerial PT. Perkebunan Nusantara V, Pekanbaru. *Falkutas Ekonomi*. Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indragiri Tembilahan Jurnal akuntansi dan keuangan, 6.
- Ni Kadek Astini, dkk. 2014. Pengaruh Akuntabilitas Publik Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial SKPD di Kabupaten Klungkung. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*. 2(10).
- Nordiawan, Deddi. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 39 Ayat 2 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sari, E.J.O., Taufik, T., dan Hasan, M.A. 2016. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, desentralisasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah (studi pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). Disertasi. Universitas Riau.
- Sekaran, dkk. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suyanto. 2011. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Pada Pejabat Eselon II Dan III di SKPD Kota Metro. Universitas Metro Lampung).
- Yulianto, Ahmad Rudi. 2019. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati, 14(2)
- Yuwono, Sony; Indrajaya, Tengku Agus dan Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Edisi Kesatu, Bayumedia Publishing. Malang.